

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), Hlm. 134.

Andi Hamzah, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005).

Bratakusumah, Deddy Supriady, *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Eko Budiharjo, *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009).

Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), Hlm. 131.

F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Yogyakarta: Karya Putera, 1971).

Hilmy Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Gradika, 2002).

Kelsen, H. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2006).

Komarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, (Jakarta: Yayasan REI Rakasindo, 1997).

Khelda, Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016).

Nyoman, Sumaryadi, I., *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

Rasyid Ryaas, *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar (dan) Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002).

Sayafiie Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).

Sadu, Wasistiono dan Fernandes Somangunsong, *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas)*, (Sumedang/Bandung: IPDN Press, 2015).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009).

Sunarto. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. (Semarang: UNNES Press, 2012).

Supriyanto, B. (2019). Analisis Kebijakan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 5, No. 1. Hlm 1-22.

Sri, Maulidiah, *Pelayanan Publik: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, (Bandung: Indra Prahasta, 2014).

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010).

Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah lebih memfokuskan kepada instrumen-instrumen pelaksana perencanaan pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penelitian, Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Serta Kawasan Industri.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak dan Kewajiban DPRD.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

INTERNET

Pelayananpublik.id. 2020. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan, Tugas, Fungsi Hingga Jenisnya. (<https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan-tugas-fungsi-hingga-jenisnya/>). Diakses pada 26 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB

Pemerintah.net, 2014, Arti Pemerintah, (<https://pemerintah.net/arti-pemerintah/>). Diakses 26 Oktober 2020 pukul 15.45 WIB

JURNAL

Andi Pitono. (2012). Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 2, No. 2. Hlm. 21.

Brahmana, Ida Bagus Rehadi Yoya, I. Wayan Parsa, dan Nengah Suharta. (2014). Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 4. Hlm. 10-11.

D. Manar. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 13, No. 1, Hlm. 43.

Firdianti, Sri. (2010). Perkembangan Permukiman Penduduk di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 1997-2007. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 31.

Galang, Adit Hutsa. (2017). Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Semarang. *Thesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm. 37.

Irvan Suprayogi. (2019). Implementasi Tugas Disperkim Dalam Mencegah Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kelurahan Kaligawe Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Semarang. Hlm. 22.

Jayadinata, J. T. (1986). Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah Bandung. *ITB Press, Bandung*.

Kurniasih, S. (2007). Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara-Jakarta Selatan. Jakarta: Universitas Budi Luhur. Hlm. 753.

Kumalasari, R. (2019). Tanggung Jawab Penyelenggara Pembangunan Perumahan Terhadap Penyerahan Prasarana Saran dan Utilitas Umum Dalam Perumahan Kepada Pemerintah Daerah. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. Vol. 3, No.1. Hlm. 5.

Latif, M.B. and Wisnu Setiawan, S.T. (2020). Penataaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Dengan Konsep Urban Sustainable Settlement. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. Hlm. 6.

Mandey, M. (2016). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance”. *Lex Administratum*. Vol. 4, No. 2.

Muhammad Aziz Nurhakim. (2018). Pemenuhan Atas Sarana Dan Utilitas Pada Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni Rajeg Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1, No.1. Hlm 1.

Nia Kurniati. (2014). Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No.1. Hlm 1.

Novi Setia Yunas. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembanguna Berparadigma Masyarakat. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7, No. 1, Hlm. 2.

Nurhakim, Muhammad Aziz & Pandamdari, E. (2017). Pemenuhan Atas Sarana dan Utilitas Pada Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni Rajeg Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Perumikan. *Jurnal Hukum Aditama*. Vol. 1, No. 1. Hlm. 1.

Puspa Susilawati, Djumadi Purwoadmojo. (2019). Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Dalam Penyerahan Fasilitas Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang. *Notarius Jurnal Studi Kenotariatan*. Vol. 12, No. 2. Hlm. 669.

Rauf, R. (2017). Hakekat Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. 3, No. 2. Hlm. 345-350.

Saputra, Agung Arafat. (2018). *Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Publik Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 5, No.1. Hlm 383.

Setiawan, I., Nuswanto, H. and Ariyono, A. (2019). Pengawasan DPRD Kota Semarang Terhadap Penggunaan Anggaran Daerah Semarang Oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 5, No. 3. Hlm. 12-25.

Soares, Armando, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 2. Hlm. 3.

Soimin dan Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UII Press, Yogyakarta*. Vol. 2, No. 3. Hlm. 5.

Surdia, Reza M. (2017). Tata Kelola Persampahan di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Ditinjau dari Aspek Penanganan Sampah. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan. Hlm. 21.

Sari, Ace Lingga. (2013). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Lingga). *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1. Hlm. 3.

Tamsir, R. (2012). Tinjauan Yuridis terhadap Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. Hlm. 7.

Triyanti, D.N. (2019). Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman di Rumah Susun Bandarharjo Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Hlm. 10.

Widyasari Her Nugrahandika, Retno Widodo Dwi Pramono. (2018). Lokalitas Pengaturan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di DIY: Tipologi Permasalahannya. *Seminar Nasional Space, Mercubuana*. Vol. 3, No. 1. Hlm. 1-2.

WAWANCARA:

Agung Utomo, Achmad. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Wawancara. Semarang: 17 Februari 2021.